

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 8
Masa Persidangan : III
Tahun : 2021-2022
Pada hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2022
Dimulai pada jam : 10.59 WIB.
Sampai dengan jam : 12.59 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Yunianto, S.P - Ketua
2. Muh. Amin, S.Ag. - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 39 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 6 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD.
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman pers yang berbahagia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 38 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022, hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 10.59 W.I.B. secara resmi kami buka serta terbuka untuk umum ----- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD.
3. Penutup.

Kami tanyakan apakah susunan acara tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali). Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022, DPRD telah menyerahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Oleh karena Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung telah selesai melaksanakan pembahasannya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 05/BAMUS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, hari ini akan kita ikuti laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Juru Bicara Badan Anggaran DPRD kami persilakan -----Stop.

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD

OLEH SLAMET, S.E.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang saya hormati :

Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Saudara Bupati Temanggung

Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Saudara Sekda, para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Para Camat,dan Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan –rakan anggota DPRD

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini saya atas nama Badan Anggaran DPRD mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Temanggung atas pembahasan Raperda Kab. Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota badan Anggaran DPRD, Saudara Bupati, yang telah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan bapak/ibu dari jajaran OPD yang telah ikut melakukan pembahasan.

Dan selanjutnya sebelum saya bacakan Keputusan Badan Anggaran, ijinakan saya laporkan beberapa catatan atas pendapat, saran, masukan dari para anggota Badan Anggaran, dan penjelasan dari bapak ibu TAPD dan OPD selama pembahasan berlangsung sampai dengan ditetapkannya keputusan Badan Anggaran sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran APBD TA 2021 yang telah di audit BPK-RI ini terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 93.036.822.735 dan setelah ditambahkan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp. 254.248.460.087 akan tetapi dari sejumlah SiLPA tersebut yang bersifat ad mark sebesar Rp. 175.622.740.886 diantaranya berasal dari sisa BLUD Puskesmas dan RSUD, BOS, DAK fisik non fisik, dan DBHCHT. Sehingga masih sisa sebesar Rp. 78.585.719.201 sedangkan pada APBD tahun 2022 telah dianggarkan defisit Rp. 112.608.410.174,- artinya pada APBD Perubahan nanti, perubahan tahun 2022 ini sudah tidak ada sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah SiLPA BLUD RSUD dengan catatan bilamana RSUD atau bila RSUD belum membuat perencanaan penggunaannya ditahun ini. sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya keras perencanaan keuangan yang akurat, penataan manajemen keuangan dan manajemen kas yang efektif dan efisien
2. Rendahnya realisasi pendapatan sewa BMD yaitu yang berasal dari kios, Los pasar juga menjadi perhatian di Badan Anggaran

3. Terhadap keberadaan Pasar Temanggung Permai yang sudah lama tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya pasar maka selayaknya dan waktunya Pemda untuk membuat sebuah kajian pemanfaatan ke depan
4. Terhadap beberapa penyebab pembangunan infrastruktur dengan hasil yang kurang baik, ini juga menjadi topik pembahasan
5. Terhadap kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Sanggrahan yang boleh dibilang hampir overload, maka disarankan oleh Badan Anggaran ini untuk meningkatkan manajemen pengolahan sampah, karena belum punya tempat lain.

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati

Demikian sedikit catatan laporan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya izinkan saya bacakan Keputusan Badan Anggaran beserta lampiran-lampiran keputusannya, karena ada dua lampiran.

Lampiran I:

Satu, Terhadap buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, penyebab utamanya adalah tidak maksimalnya fungsi konsultan pengawas. Jumlah konsultan pengawas yang terlibat dalam kegiatan infrastruktur hanya itu-itu saja hal tersebut berdampak pada kualitas sejumlah pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab konsultan pengawas.

Dua, Pemerintah Daerah harus berani bersikap tegas terhadap rekanan yang kualitas pekerjaannya tidak baik dengan memberikan evaluasi khusus.

Tiga, Pada tahun-tahun kedepan Kualitas pembangunan infrastruktur agar ditingkatkan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina jasa konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. PPK membentuk Tim pendukung yang terdiri dari tim teknis dan tim pembantu sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021;
- c. Menerapkan manajemen konstruksi secara maksimal, dengan mengoptimalkan peran penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Empat, Terkait kelebihan daya tampung TPA sanggrahan dimana rata-rata sampah yang masuk 120 sampai 130 ton per hari sementara pengadaan TPA Temanggung Utara belum memungkinkan untuk diadakan karena berbagai pertimbangan dan berbagai faktor, Badan Anggaran merekomendasikan:

- a. Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan lahan agar usia TPA sanggrahan dapat berlangsung lebih lama.

- b. Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal pengolahan sampah.
- c. Pemerintah Daerah memberikan instruksi kepada Desa untuk mengoptimalkan TPSD yang sudah ada sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar sampah residu.

Lima, Rendahnya investasi pada tahun 2021, ini yang masuk investasi yang dialporkan oleh dinas terkait sebesar 1,01 triliun dikarenakan beberapa kendala diantaranya adalah ketidakjelasan regulasi yaitu Perda tentang RT RW dan kurangnya informasi investasi, untuk itu perlu diupayakan kemudahan perijinan berusaha dan meningkatkan promosi investasi. Tetapi disisi lain Pemerintah Daerah juga harus bertindak tegas terhadap pelanggar yang melanggar pendirian bangunan di kawasan yang dilarang oleh peraturan perundangan. Ini lampiran I, selanjutnya lampiran II itu dari masing-masing OPD.

Kesatu, DINKOMINFO

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Anggaran Setelah Perubahan Rp. 2.693.642.750, realisasi Rp. 2.586.876.329, sehingga sisa Rp. 106.766.421. Sisa anggaran tersebut merupakan honor supporting staff Temanggung TV, RT-FM Radio, dan Media Center bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari tahun 2022. Catatan Permasalahan ini juga terjadi di berbagai OPD yang ada Suporting Staf maka sistem pembayaran honor sebisa mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan di tahun berjalan agar tidak menyisakan anggaran yang prosentasenya cukup besar

Kedua, BPPKPAD

Pendapatan:

- 1). Pajak restoran dan sejenisnya Target Anggaran Rp. 300.000.000, realisasi Rp. 393.595.655, lebih anggaran Rp. 93.595.655. permasalahannya Penetapan target pendapatan masih sangat jauh dari potensi yang sebenarnya. Catatan Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens terhadap pengelola rumah makan dan restoran tentang kewajiban membayar pajak.
- 2). Pendapatan transfer antar daerah ini dianggarkan setelah perubahan Rp. 160.711.522.667, realisasinya 151.917.958.079, sehingga ada kekurangan Rp. 8.793.564.588. Permasalahannya Realisasi DBH atau Dana Bagi Hasil dari Provinsi tidak sesuai dengan target yang didasarkan pada SK Gubernur. Dari sejumlah tersebut masih terdapat piutang dari Provinsi sebesar Rp1,2 Milyar.

Belanja:

Sub kegiatan Pengamanan barang milik daerah, ini dianggarkan Rp. 1.828.367.500 realisasinya Rp. 711.121.875, sehingga sisanya cukup banyak yaitu Rp. 1.117.245.625 Permasalahannya Realisasi pensertifikatan tanah masih jauh dari target yang ditetapkan hanya 94 dari target 720 sertifikat dikarenakan keterbatasan petugas dan peralatan ini

sampai dengan akhir tahun 2021, sekarang sudah bergerak. Sampai dengan akhir tahun 2021 masih terdapat 1.416 bidang tanah yang belum disertifikat, disisi lain KPK meminta tahun 2022 ini pensertifikatan harus selesai, dalam rangka mengamankan barang milik daerah, untuk itu pensertifikatan tanah Pemda agar segera diselesaikan.

Ketiga, Bagian Perekonomian Setda

Sub kegiatan Belanja modal peralatan dan mesin Anggaran Rp. 904.670.000, tidak terealisasi, sehingga sisanya sama. Permasalahannya Tidak sesuai aturan penggunaan DBHCHT, berarti ini sumber dananya DBHCHT. Catatan agar dipelajari lebih teliti tentang penggunaan DBHCHT sesuai aturan yang ada.

Keempat, DINKOPDAG

Pendapatan:

Hasil sewa BMD ini dianggarkan Rp. 3.000.000.000, realisasinya hanya Rp. 344.933.000, sehingga kurang targetnya Rp. 2.655.067.000. Permasalahannya Hasil sewa BMD yang tidak tercapai terdiri dari Pasar Temanggung Permai sebesar Rp2.543.250.000,- dan Pasar Parakan sebesar Rp111.817.000. Catatan Pedagang di Pasar Temanggung Permai rata-rata sudah tidak mau menempati karena tidak ada pembeli alias sepi. Ke depan agar dilakukan perencanaan dan penataan ulang terhadap keberadaan Pasar Temanggung Permai.

Kelima, DINAS SOSIAL

Sub kegiatannya Pemberian Layanan Kedaruratan Anggaran APBD Rp. 0 atau tidak dianggarkan, realisasi tentu nol, sisa tidak ada. Permasalahannya ini munculnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang tidak bisa dikendalikan dan mengganggu ketertiban umum. Catatan Perlu dianggarkan kembali dan petugas bekerja secara profesional dan tegas.

Keenam atau terakhir, DINDIKPORA

Sub kegiatannya ini program, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1. Anggaran setelah perubahan Rp. 180.000.000, realisasi 0, sisanya Rp. 180.000.000. Permasalahannya Tidak ada yang mendaftar, padahal ini gratis ya, bantuan. Untuk pelaksanaan tahun 2022 agar direncanakan dengan matang yang memuat minimal kriteria calon penerima sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan.

Bapak ibu yang saya hormati, demikian telah saya bacakan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung beserta lampirannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya saya akhiri.

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalamualaikum Wr. Wb.

Mohon maaf keliwatan Pak Ketua, saking semangate malah keliwatan Pak Bupati. keputusane lah ini, mohon maaf ini malah saya tekuk, saya lipat kok saya tekuk. Mohon maaf wong ndeso yo bahasane. Keputusannya saya baca mohon maaf semunya tidak mengurangi substansi, ya jelas tidak mengurangi aturan.

KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN DPRD OLEH SLAMET, S.E.
--

KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022, Badan Anggaran telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Badan Anggaran perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat satu dan seterusnya; Memperhatikan : Pembicaraan, saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapat kerja pada tanggal 30 Juni, 1 dan 2 Juli 2022 yang terdiri oleh, yang dihadiri oleh : LEGISLATIF :1. Yunianto, SP Ketua, 2. Daniel Indra Hartoko, S.E. Wakil Ketua, 3. Gunawan Adi Purnomo Anggota, 4. Dra.Titik Winarni Anggota, 5. H. Erda Wahyudi, S.H. Anggota, 6. Badrun Mustofa, S.Pd. Anggota, 7. Bejo Tursiyam, S.E. Anggota, 8. H. Arif Nurhadi Subroto, S.E. Anggota, 9. Ishadi Anggota, 10. Slamet, S.E. Anggota, 11. Rochmat Fauzi TH Anggota, 12. Slamet Eko Wantoro Hadi Anggota, 13. Indah Cahyani, S.Sos. Anggota, 14. Umi Fadhilah Anggota, 15. Isnarwandi, S.Ag. Anggota, 16. Agus Munadi, S.Sos., M.Si. Sekretaris Bukan Anggota. EKSEKUTIF : 1. Drs. Hary Agung Prabowo, M.M. Sekretaris Daerah, 2. Ir. Kristri Widodo, M.Si. Asisten Adm. Umum, 3. Ripto Susilo, S.H., M.Si. Asisten Ekbang, 4. Tri Winarno, S.E., M.M. Kepala BPKPAD, 5. Dwi Sukarme, S.T., M.T. Kepala BAPPEDA, 6. dr. Intan Pandanwangi B, M.M. Kepala Dinkes, 7. Prasajo, S.Ag., M.M. Kepala Dinsos, 8. Dra. Dyah

Ekiana, M.Si. BPKPAD, 9. Hilmy Tineke D, S.E., M.M. BPKPAD, 10. Woro Pratiwi, S.P., M.Eng. BPKPAD, 11. Abdul Rochman BPKPAD, 12. Ziadatun Ni'mah BPKPAD, 13. Endro Suwarso, S.H. Kabag Hukum, 14. Siti Choiriyah L., S.E. Kabag Pembangunan, 15. Husnul H. Dinas Kesehatan, 16. Sugiharti Dinas Kesehatan, 17. Achmad Asfari, S.Km., M.Si. Dinas Kesehatan, 18. Eko Kurnia R. Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi anggaran sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.971.005.990.029,00, 2. Belanja Daerah Rp 1.877.969.167.294,00, sehingga surplus Rp. 93.036.822.735,00., 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 162.455.516.962,00, b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.243.879.610,00, Pembiayaan netto Rp. 161.211.637.352,00, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA Rp. 254.248.460.087,00. KEDUA : Memberikan catatan dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2 Juli 2022 Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yuniyanto ditandatangani.

Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Demikian Keputusan Badan Anggaran telah kami bacakan, dan lampiran-lampiran mohon maaf telah saya bacakan mendahului. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalamualaikum Wr. W b.

Kepada saudara Slamet, S.E. selaku Juru Bicara Badan Anggaran disampaikan terimakasih. Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan

Badan Anggaran atas hasil pembahasannya, kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, waktu kami silahkan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

OLEH TRI EKO WASTI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN NOMOR : 1/BANGGAR/VII/2022 TANGGAL 2 JULI TAHUN 2022 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Yang kami hormati Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang saya hormati Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung ataupun yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD,

Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi, yaitu Rapat Paripurna dengan agenda membahas Hasil Keputusan Badan Anggaran Nomor: 1/Banggar/VII/2022 tanggal 2 Juli tahun 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa berupaya menegakkan keadilan dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung, dan tak lupa kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh Anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 ini.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah mencermati dan menelaah hasil keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan sesaat tadi serta laporan dari anggota Fraksi kami yang duduk dalam Badan Anggaran, maka FPKB dapat memberikan masukan dan catatan sebagai berikut :

Satu, Terkait dengan pendapatan Asli daerah, FPKB meminta kepada Pemerintah Daerah agar terus mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan dengan langkah kongkrit, utamanya pada pos-pos yang capaian targetnya masih sangat rendah, seperti pada dinas kesehatan dan dinas koperasi dan perdagangan.

Dua, Terkait Belanja Daerah, Pemerintah perlu melakukan persiapan yang lebih matang dan lebih teliti, mulai dari perencanaan, perangkat yang dibutuhkan dan pelaksanaan kegiatan sampai pada selesainya kegiatan dengan menentukan prioritas kebutuhan dan melihat ketersediaan anggaran. Hal ini penting, agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal serta dipergunakan dengan semestinya.

Tiga, Terhadap buruknya kualitas pembangunan infrastruktur yang selalu terjadi secara berulang setiap tahunnya, FPKB memandang Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Menejeman Konstruksi yang bertugas melakukan monitoring dan pengawsan di lapangan serta memastikan pelaksanaan kerja sesuai metode konstruksi yang benar, sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

Empat, Terkait kelebihan daya tampung TPA sanggrahan dimana rata-rata sampah yang masuk 120 sampai 130 ton per hari, sementara pengadaan TPA Temanggung Utara belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunannya karena berbagai pertimbangan dan berbagai faktor, untuk itu FPKB mendorong agar Pemerintah Daerah:

- a. Memaksimalkan pemanfaatan lahan yang masih ada di TPA Sanggrahaan, sehingga jangka waktu daya tampung TPA memungkinkan untuk 5 sampai 8 tahun kedepan;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal pengolahan sampah;
- c. Memberikan instruksi kepada Desa agar mengoptimalkan TPSD yang sudah ada sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar sampah residu.

Lima, Terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa dari APBD Kabupaten Temanggung, yang mempersyaratkan adanya tanda tangan Ketua BPD, FPKB berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak relevansinya bahkan justru akan menghambat proses pencairan bantuan karena harus merubah proposal permohonan bantuan, untuk itu kami berharap Bupati bisa meninjau atau mengkaji kembali perbut tersebut.

Selanjutnya, dengan senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk serta ridlo Allah SWT teriring bacaan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan; dapat menerima dan menyetujui hasil Keputusan Badan Anggaran Nomor: 01/Banggar/VII/2022 tanggal 2 Juli tahun 2022 ini dengan rincian : 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.971.005.990.029,00, Belanja Daerah Rp. 1.877.969.167.294,00, surplus Rp. 93.036.822.735,00., Pembiayaan Daerah : Penerimaan Pembiayaan Rp. 162.455.516.962,00, Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.243.879.610,00, Jumlah Pembiayaan netto Rp. 161.211.637.352,00, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 254.248.460.087,00. Dan selanjutnya kami menyerahkan kepada sidang paripurna hari ini untuk ditetapkan peraturan, menjadi Peraturan Daerah.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 4 Juli 2022 Fraksi

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum ditandatangani.

Kepada saudari Tri Eko Wasti selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar di silahkan---- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

OLEH H. DJARJONO, B.A.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR Terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Para anggota FKPD atau yang mewakili

Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Camat, dan para Direktur BUMD dan Ketua KPUD baik yang mengikuti rapat secara langsung di gedung DPRD maupun yang mengikuti rapat secara virtual

Para tamu undangan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan, kemudian mendengarkan laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan catatan sebagai berikut :

Satu, Terhadap buruknya kualitas pembangunan infrastruktur Kabupaten Temanggung TA 2021, FPG berharap untuk segera dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi dan meningkatkan manajemen jasa konstruksi yang melibatkan Panitia Pelaksana Kerja (PPK), dan untuk rekanan/penyedia jasa yang hianat kontrak untuk dilakukan tindakan tegas.

Yang ke-Dua, Terkait masih adanya temuan pembangunan gedung yang belum berizin, FPG berharap Pemerintah Daerah mengambil langkah dan tindakan tegas demi terjaganya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan demi tegaknya Perda RT/RW.

Yang ke-Tiga, Terkait program pengentasan kemiskinan, FPG berharap Pemerintah Daerah melakukan update database kemiskinan dan lebih intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan database kemiskinan yang akurat, maka sasaran menjadi lebih tepat dan kemiskinan bisa turun.

Yang ke-Empat, Terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat barang-barang yang tidak sesuai antara kualitas dan harga yang seharusnya, misalnya beras. Untuk hal ini diminta adanya perbaikan kualitas mengingat bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golongan Karya dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) serta mengucapkan (*Bismillahirrohmanirrohim*) menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2022 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp. 1.971.005.990.029,00; Belanja Daerah Rp. 1.877.969.167.294,00, surplus Rp. 93.036.822.735,00., Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 162.455.516.962,00; b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.243.879.610,00, Jumlah Pembiayaan netto Rp. 161.211.637.352,00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 254.248.460.087,00.

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kab. Temanggung.
Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Akhirulkhalam, Wallahul Muwafiq Illa Aqwamtthariq, Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Temanggung, 4 Juli 2022 Fraksi

PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG.

Ketua Slamet, S. E. Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani.

Kepada saudara Djarjono, B.A. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disampaikan terima kasih. Mohon petunjuknya ini Gema Adzan sudah berkumandang, kira-kira dilanjutkan apa kita break sebentar? Break dulu nggih karena itu Masjid Agung. Terima kasih. ---ketuk palu satu kali---

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Gerindra di silahkan-- Stop.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA OLEH INDAH CAHYANI, S.Sos.
--

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA Nomor : 40 /FG-PF/ VII /2022 Terhadap : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk penyampaian kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah agar segera menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati.

Pada kesempatan ini Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TAPD dan Badan Anggaran DPRD yang telah menyelesaikan serangkaian proses pembahasan LPPD APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDRA memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Terdapat SILPA sebesar Rp. 254.248.460.087,- secara nominal mengalami peningkatan dibanding SILPA Tahun Anggaran 2020. Fraksi Gerindra berharap agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan SILPA untuk Belanja Daerah, untuk pembentukan Dana Abadi Daerah juga untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

2. Mengingat tahun 2021 merupakan tahapan hampir akhir (tahapan ke-4) RPJMD 2018 –2023, dimana anggaran belanja daerah merupakan instrument utama dalam pencapaian visi misi daerah, maka diperlukan upaya lebih keras lagi untuk perencanaan keuangan yang lebih akurat, penataan manajemen keuangan yang lebih kredibel. Dengan demikian serapan anggaran lebih maksimal untuk memenuhi janji politik kepala daerah.
3. Terhadap peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dari APBD Kabupaten Temanggung yang mempersyaratkan tanda tangan BPD, Fraksi Gerindra memohon kepada bupati agar dapat ditinjau kembali.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Keputusan Badan Anggaran Nomor 1/ Banggar/VII / Tahun 2022 tanggal 2 Juli 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 Fraksi Gerindra dapat menyetujui dan menerima, keputusan Badan Anggaran tersebut, dan mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapat persetujuan. Demikian Pendapat Fraksi Gerindra, apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 4 Juli 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Chyani S.Sos ditandatangani.

Kepada saudara/I Indah Cahyani, S.Sos selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di silahkan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OLEH AHMAD SYARIF YAHYA

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat :

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati dan Waki Bupati Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se- Kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya termasuk kita sekalian. Aamiin.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami. Dan ucapan terimakasih juga apresiasi kami sampaikan pula kepada anggota Badan Anggaran DPRD beserta Bupati dan seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja dengan baik dalam melakukan pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Rapat Dewan yang terhormat.

Badan Anggaran telah menyepakati untuk menetapkan SILPA sebesar Rp 254.248.246.087,- .dengan berbagai catatan. Namun bahwa Silpa ini tidak sepenuhnya murni bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBD di Perubahan 2022 karena beberapa anggaran tersebut sifatnya In-Out. Selain itu juga sudah terpasang pada APBD 2022 cukup besar yakni Rp 112 Milyar lebih. Sehingga kita tidak bisa berharap bahwa APBD perubahan masih bisa mengalokasikan kegiatan tambahan.

Dari beberapa prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah pada APBD 2021 ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan sebagaimana yang menjadi temuan BPK RI, yang menyangkut pelayanan public, administrasi pemerintahan juga administrasi keuangan. Sehingga FPPP setuju dengan catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran agar pemerintah daerah melakukan pembenahan juga evaluasi terhadap beberapa kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Selain itu FPPP juga memberikan catatan yang merupakan hasil rapat dengan beberapa OPD diantaranya :

1. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sudah melampaui target, yaitu sebesar Rp 363 milyar lebih dari target Rp 271 milyar lebih. Namun ada beberapa pos pendapatan yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan seperti Pajak Restoran dan sejenisnya yang di tahun 2021 hanya ditargetkan Rp 300 juta dan terealisasi Rp 393 juta lebih. Dimakna bahwa sebenarnya potensi mencapai angka 3 milyar Karena dengan target itu yang merupakan kurang lebih 10% dari nilai transaksi setahun masih sangat kecil. Sebagaimana hasil MCP yang dilakukan KPK tahun lalu terdapat temuan bahwa banyak obyek pajak, hotel, restoran dan rumah makan yang tidak melakukan operasionalnya dengan baik. Tidak dipergunakannya alat tapping box yang sudah disediakan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens an pengawasan lebih terhadap hotel, restoran dan rumah makan tentang kewajiban pembayaran pajak.
2. Kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT beberapa tahun terakhir banyak belum bisa dilaksanakan karena terbentur regulasi yang ada. Seperti yang terakhir terkait belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan pembelian mobil operasional untuk Satpol PP dalam rangka penegakan perda sebesar Rp 900 juta lebih. Hal ini tentunya mempengaruhi keterserapan anggaran dan optimalisasi realisasi kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan kajian secara matang agar penggunaannya dapat maksimal.
3. Menanggapi buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung tahun 2021, yang salah satunya adalah Puskesmas Jumo dan juga Puskesmas Bulu, yang cukup menjadi perhatian, FPPP memandang, hal ini menunjukkan kurang dan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan dan progress kegiatan. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar Dinas Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Juga perlu evaluasi berkala pada setiap paket pekerjaan. Agar permasalahan buruknya kualitas pembangunan infrastruktur tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya setelah mendengar laporan dari pelapor Badan Anggaran dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat.

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor; 01 / Banggar/VI/ Tahun 2022 Tentang

Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada manfaatnya, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallohulmuwaffiq ilaa aqwamit thorieq

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 4 Juli 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ketua Rochmad Fauzi TH Sekretaris Ahmad Syarif Yahya, ditanda tangani.

Kepada saudara/I Ahmad Syarif Yahya selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan di silahkan -----
----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN

OLEH ELYNAWATI, S.Pd.

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : 04/FRAKSIPANBerkeadilan/VII/2022

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Bupati Temanggung

Yang kami Hormati, Jajaran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH atau yang mewakili

Yang kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD Kabupaten Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil'alamin Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, salam pula kepada para keluarga , sahabat dan para penegak risalahnya yang senantiasa istikhomah menegakkan kalimat tauhid dimuka bumi ini hingga di yaumul akhir.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Sidang, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PAN Berkeadilan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, dalam forum yang terhormat ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mendengarkan laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi dan masukan dari Anggota Fraksi PAN Berkeadilan yang duduk di badan Anggaran, dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” FRAKSI PAN Berkeadilan dapat menerima dan menyetujui KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2022 tanggal 2 Juli 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.971.005.990.029,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp1.877.969.167.294,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 93.036.822.735,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 162.455.516.962,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 1.243.879.610,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp 161.211.637.352,00</u>
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 254.248.460.087,00

Namun demikian izinkan kami Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan catatan-catatan strategis atas laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggarn 2021 sebagai berikut :

1. Terkait laporan yang di sampaikan oleh Badan Anggaran DPRD kabupaten Temanggung, Fraksi PAN Berkeadilan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
2. Derajat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah kab. Temanggung masih cukup rendah karena adanya kurang konsistennya dalam

pelaporan keuangan yaitu adanya perbedaan antara laporan realisasi antara dokumen LKPJ Bupati tahun 2021 dengan Laporan Keuangan Daerah hasil audit BPK. Untuk itu perlu adanya perbaikan selanjutnya.

3. Membangun kawasan agraris tentunya harus disertai dengan adanya regulasi yang mendukung kesejahteraan petani. Akan tetapi saat ini tidak ada kebijakan yang memihak seperti permasalahan pupuk bersubsidi yang tentunya menjadi perhatian Fraksi PAN Berkeadilan. Berkaitan dengan hal itu ditandatangan kami berharap Pemerintah daerah perlu melakukan penyempurnaan data melalui verifikasi faktual data penerima pupuk bersubsidi dan pemilihan komoditas prioritas berdasarkan kebutuhan pangan pokok.
4. Terkait Peraturan Bupati No 2 tahun 2021 Fraksi PAN Berkeadilan mendorong serta mendesak agar ada kajian ulang pada draft seperti syarat-syarat adanya tanda tangan BPD sehingga diharapkan tercipta penyederhanaan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir semua kepentingan rakyat tanpa ada sekat.
5. Terkait pengelolaan sampah yang setiap hari masuk ke TPA sekitar 120 Ton / hari, kami berharap ada inovasi - inovasi dari pemerintah daerah, misalnya dengan teknologi terkini yaitu pemanfaatan teknologi plasma, atau lebih dikenal dengan nama plasma gasifikasi (gasification) dan pengkristalan atau vitrifikasi (vitrification).
6. Mengingat tahun 2022 merupakan tahun tahapan menjelang akhir RPJMD 2018-2023 dimana anggaran belanja daerah merupakan instrument utama dalam mencapai Visi dan Misi daerah pada RPJMD tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih keras dari pemerintah daerah untuk merencanakan skema keuangan yang lebih akurat, penataan manajemen keuangan daerah yang lebih kredibel dan perbaikan manajemen kas daerah yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, serapan anggaran belanja pada tahun akhir RPJMD sebagai tahun percepatan pembangunan akan lebih maksimal untuk memenuhi target kinerja pemerintah daerah kabupaten Temanggung.
7. Fraksi PAN Berkeadilan meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun anggaran 2021, sehingga dalam penyusunan program atau kegiatan pada tahun berikutnya akan mengacu pada serapan atau realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.
8. Fraksi PAN Berkeadilan berpendapat bahwa menjelang panen raya tembakau diperlukan adanya evaluasi persoalan pengawasan dan regulasi serta kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, jangan sampai kegagalan tugas gugus tembakau pada tahun yang lalu terulang kembali.

Demikian Pendapat Fraksi PAN Berkeadilan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 ,ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq Fastabiqul khairat

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Temanggung, 4 Juli 2022

FRAKSI PAN BERKEADILAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Badrun Mustofa, S.Pd ditandatangani Sekretaris Bejo Tursiyam, SE ditandatangani.

Kepada saudara/I Elynawati, S.Pd selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara Berkeadilan di silahkan -----
Stop.

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA OLEH UMI FADILLAH
--

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yth. Saudara Bupati Temanggung

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Instansi Vertikal, Para Direktur BUMD, Saudara Ketua KPU dan Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Fraksi Nusantara DPRD Kabupaten Temanggung, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke-hadzirat Tuhan YME

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional rapat paripurna dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Fraksi Nusantara mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Temanggung serta semua pihak yang terlibat dalam pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, tentunya Fraksi Nusantara yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional memandang bahwa laporan tersebut menjadi sangat penting dan mendapatkan perhatian bagi kami. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas Pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintah dengan maksud bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan sementara kekurangan sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari, dengan harapan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

APBD merupakan wujud kinerja keuangan Daerah yang akan diumumkan dalam program kegiatan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu keberhasilannya tidak hanya dicapai target dan realisasi anggarannya, tetapi juga harus dilihat sejak proses perencanaan, pelaksanaannya serta perwujudannya bagi masyarakat, peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan hal tersebut, Pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting, potensi PAD perlu dikelola dan diurus dengan sungguh-sungguh.

Rapat Dewan Yth,

Setelah mendengar laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh pelapor Badan Anggaran Dewan sesaat tadi, dan masukan dari anggota kami yang duduk di Badan Anggaran, maka dengan seraya memohon ridho dan petunjuk dari Allah SWT dan diawali dengan mengucapkan *Bismillahirrahmahnirahiim*, Fraksi Nusantara menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Nomor : 1/Banggar/VII/2022 tertanggal 2 Juli 2022 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Namun demikian tanpa mengurangi arti persetujuan tersebut, Fraksi Nusantara menyampaikan pandangan, saran dan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Nusantara meminta perhatian serius Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi atau catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja Pemerintah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Fraksi Nusantara meminta Pemda untuk memperhatikan serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun 2021, sehingga dalam penyusunan program kegiatan pada tahun berikutnya akan mengacu pada serapan atau realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.
3. Agar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas Pemda pada tahun-tahun mendatang.
4. Kepada setiap OPD, Fraksi kami menekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian program birokrasi yang baik dalam melayani publik.
5. Fraksi Nusantara menghimbau agar pemerintah daerah berani bersikap tegas terhadap rekanan yang kulaitas pekerjaannya kurang baik bila perlu memberikan beklis
6. Mohon ditinjau ulang Perbup No 2 Tahun 2021 tentang Pendoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dari APBD Kabupaten Temanggung yang mempersyaratkan adanya tanda tangan BPD

Hadirin yang terhormat.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi NUSANTARA terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada kita dalam mengemban amanat rakyat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 04 Juli 2022

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua, Isnarwandi, S.Ag Sekretaris, Umi Fadillah, semuanya di tandatangani

Kepada saudara Umi Fadillah selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi PDIP untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara di silahkan ----- Stop.

PENDAPAT FRAKSI PDIP
OLEH Dra. TITIK WINARTI

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati dan wakil bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, Asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Yth. Para camat se kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Badan Anggaran dan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Badan Anggaran, Berdasarkan keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2021, tanggal, 2 Juli 2021 , tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui hasil keputusan Badan Anggaran untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung pada Sidang Paripurna hari ini .

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 didapat hasil sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.971.005.990.029,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.877.969.167.294,00</u>
c. Surplus / Defisit	Rp. 93.036.822.735,00
d. Pembiayaan Netto	<u>Rp. 161.211.637.352,00</u>
SILPA	Rp. 254.248.460.087,00

Tanpa mengurangi arti persetujuan kami ada hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

- Fraksi PDI Perjuangan meminta, sebagian Silpa BLUD digunakan di perubahan APBD 2022, untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar yang dalam RPJMD sampai saat ini masih jauh dari target capaian, seperti;
 - Irigasi, perbaikan jalan dan drainase.
 - Penanganan PGOT dan ODGJ

Dalam penanganan PGOT dan ODGJ tersebut diatas perlu dilakukan koordiansi antara Dinkes, Dinsos, dan RSUD
- Buruk nya kualitas pembangunan 2 Puskesmas (Puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo), salah satu sebabnya tidak berdaya/ berfungsinya konsultan pengawas sehingga mulai tahun 2022 dan seterusnya penunjukan konsultan pengawas jangan asal dan konsultan pengawas yang kemarin hasil kerjanya buruk jangan di pakai lagi, disamping buruknya kinerja konsultan pengawas juga karena PPK (pejabat pembuat komitmen) belum melaksanakan amanat Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 yaitu membentuk tim pendukung yang terdiri dari tim teknis dan tim pembantu. Mulai tahun 2022 amanat Presiden di atas harus di laksanakan
- Program pengentasan kemiskinan yang dirasa masih belum ada peningkatan untuk segera ditindak lanjuti update database, sehingga sasaran tepat dan kemiskinan turun.
- Terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bnatuan Keuangan Khusus Kepada Desa dari APBD Kabupaten Temanggung yang mempersyaratkan adanya tanda tangan BPD, Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk di tinjau lagi. Kalau alasan nya supaya BPD mengetahui adanya bantuan keuangan khusus, didalam Perda tentang Pemerintahan Desa sudah ada mekanisme dimana BPD mengetahui (permasalahan internal Pemerintahan Desa) .
- Banyak sorotan tentang mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, ada indikasi tidak sesuai dengan analisa Jabatan (Anjab), latar belakang pendidikan, kompetensi dan proses yang di lalui. proses mutasi ini terlalu sering di lakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak efektif dalam menjalankan tupoksinya. Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan Harus Di perbaiki agar tidak menjadi sorotan lagi !

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kamimohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 04 Juli 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Dra.Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati di tandatangani

Kepada saudara/I Dra.Titik Winarti selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, atas hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1/BANGGAR/VI/Tahun 2022 Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud angka 1 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.971.005.990.029,00 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 1. 877.969.167.294,00</u> |
| Surplus / (Defisit) | Rp. 93.036.822.735,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 162.455.516.962,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 1.243.879.610,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 161.211.637.352,00 |
| Sisa lebih Perhitungan Anggaran | Rp. 254.248.460.087,00 |
3. Menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 1/BANGGAR/VI/Tahun 2022.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali). Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1/Banggar/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten temanggung terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten temanggung Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Keputusan Badan Anggaran dimaksud, maka DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; Mengingat: Satu dan setrusnya, Memperhatikan: Musyawarah dan permufakatan para anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 4 Juli 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :1. Pendapatan Daerah Rp 1.971.005.990.029,00 2. Belanja Daerah Rp 1.877.969.167.294,00_Surplus/(Defisit) Rp 93.036.822.735,00, 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Rp 162.455.516.962,00, b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.243.879.610,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp 161.211.637.352,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp 254.248.460.087,00. KEDUA : Memberikan catatan, usul dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 4 Juli 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNianto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?

Rapat DPRD::

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung.

Namun sebelumnya perkenalkanlah para Pimpinan DPRD dan Bupati Temanggung untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Temanggung dengan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Bupati Temanggung dan para Pimpinan DPRD untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri -----Stop.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Penandatanganan Berita Acara selesai.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Selanjutnya akan kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan -----Stop.

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

OLEH H. M. AL KHADZIQ

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG PADA RAPAT PARIPURNA DPRD MENGENAI PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan,

Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,

Sdr. Wakil Bupati,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Direktur BUMD yang saya hormati,

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah pada kesempatan ini, kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun juga.

Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan Anggota Dewan, yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui oleh DPRD akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan dievaluasi.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, ijinilah saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, atas pendapat dan saran Anggota Dewan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum, Komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran maupun pendapat akhir

fraksi yang disampaikan beberapa saat tadi, Saya menyampaikan terima kasih dan kami perhatikan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, atas hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan segera kami tindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi serta dilaporkan secara periodik ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yang telah baik maupun opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedang capaian kinerja yang kurang baik dapat kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang dan menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar ke depan lebih berhati-hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan tidak lagi terjadi temuan-temuan yang sifatnya berulang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat akhir yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhanahuwatta'alla, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sebagai penyelenggara negara di daerah, agar segala tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatrullahi Wa Barokatuh.

Temanggung, 4 Juli 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada saudara Bupati Temanggung disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Atas nama DPRD Kabupaten Temanggung kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang telah melaporkan hasil Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan kepada TAPD maupun jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung atas kerjasamanya pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Kami sampaikan terima kasih juga kepada saudara Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili serta semua pihak yang

telah mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD hari ini, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 12.59 WIB. secara resmi kami tutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung, 4 Juli 2022 Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos., M.Si. Sekretaris DPRD, Ketua Rapat Yunianto.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD